

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai peristiwa sejarah tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, baik itu watak, kepercayaan, ajaran, ataupun perbuatan seseorang yang telah memberikan kontribusi pada zamannya. Menurut pendapat wartawan Oriana Fallaci dalam bukunya yang terkenal *Interview with History* menyatakan bahwa sejarah dilaksanakan oleh banyak orang, tapi hanya segelintir manusia yang dapat tampil karena mereka lahir pada saat yang tepat dan mampu menafsirkannya (PDAT, 1998:2). A. H. Nasution boleh jadi termasuk salah seorang yang dikatakan Fallaci itu, ialah orang yang beruntung dapat tampil dan berperan dalam pentas perjalanan sejarah Republik Indonesia. Menurut Soekanto (2003:243) dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, bahwa peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang berarti seseorang dikatakan telah menjalankan suatu peranan apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peranan A.H. Nasution pada periode peralihan kekuasaan di Indonesia dari masa pemerintahan Soekarno ke Soeharto yang merupakan periode yang cukup panjang dan berpengaruh terhadap perjalanan sejarah Republik Indonesia.

Periode Peralihan kekuasaan di Indonesia tahun 1967 pada umumnya fase itu selalu dihubungkan dengan G30S 1965, yang merupakan suatu gerakan yang secara khusus digambarkan sebagai konflik politik antara sipil dan militer. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang menjadi satu-satunya Jenderal yang berhasil lolos dari peristiwa tersebut memiliki kepentingan untuk mempertanyakan siapa dibalik G30S. Hal ini dipertegas dengan yang diungkapkan Tianlean dalam bukunya *Bisikan Nurani Seorang Jenderal* bahwa "Nasution tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai pada kesimpulan bahwa PKI-lah yang menjadi dalangnya" (Tianlean, 1997:143). Sejak saat itu tujuan politiknya menjadi semakin jelas yakni menyingkirkan PKI dari peta politik Indonesia. Sesungguhnya hal itu sudah menjadi tujuannya sejak awal, namun baru kali itulah ia dan Angkatan Darat memiliki alasan yang sangat kuat.

Usaha-usaha Nasution bersama Angkatan Darat menyingkirkan PKI ternyata dihalang-halangi oleh Soekarno yang memiliki kepentingan politik yang lebih besar untuk mempertahankan partai tersebut. Bagi Soekarno, keberadaan PKI sebagai salah satu pondasi ideologi Nasakom lebih penting bagi kelangsungan demokrasi terpimpin. Penyingkiran PKI akan sama saja dengan penghancuran sistem politik itu sendiri. Dengan kenyataan tersebut perjalanan sejarah Indonesia pun akhirnya berlangsung lebih dramatis. Sebuah suksesi pada akhirnya menjadi pilihan yang menggoda kalangan militer. Pada Maret 1967, peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi. Soekarno yang resminya masih menjabat Presiden diperlakukan sebagai tahanan politik. Barulah setahun kemudian yakni bulan Maret 1968, ia benar-benar kehilangan jabatannya

menyusul pengangkatan Soeharto secara resmi sebagai Presiden. Pada saat itu, Nasution secara struktural tidak memiliki jabatan strategis dalam tubuh Angkatan Darat. Peranannya dalam peralihan dan kekuasaan tersebut lebih banyak ditentukan oleh pengaruh dan senioritasnya yang menonjol sebagai satu-satunya jenderal berbintang empat. Soeharto yang berperan aktif menumpas G30S juga bersandar kepada Nasution untuk meminta bimbingan dan nasehat. Banyak alasan yang mendorong Nasution ikut memainkan peran aktif menggulingkan Soekarno, baik alasannya sebagai perwira militer maupun secara pribadi. Pencabutan jabatan dan wewenang strategisnya di Angkatan Darat mungkin sebuah alasan yang menentukan peranannya kemudian, dan secara psikologis ia tidak dapat melupakan para Jenderal dan putrinya yang tewas dalam peristiwa G30S yang kemudian disinyalir Soekarno ikut terlibat di dalamnya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Siswoyo (1989:1) yang dikutip dalam bukunya *Menelusuri Peran Bung karno dalam G30S/PKI*, bahwa Nasution beranggapan bahwa Soekarno terlibat dalam G30S walaupun ia tidak dapat memperkirakan seberapa jauh keterlibatannya.

Peranan Nasution dalam peralihan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan Soekarno. Antara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup lama yang diwarnai berbagai perubahan sikap. Mereka terlibat konflik mendalam pada tahun 1952 dalam peristiwa 17 Oktober. Sebuah peristiwa yang tetap diingat Soekarno sebagai usaha militer untuk melakukan kudeta dan diyakininya suatu saat akan terulang kembali. Itulah sebabnya Soekarno selalu mencurigai Nasution dengan usaha-usahanya memantapkan posisi Angkatan

Darat secara lambat tapi pasti. Walaupun mereka berdua menjalin koalisi dalam suatu hubungan saling membutuhkan untuk membangun sistem demokrasi terpimpin, Soekarno tidak menunggu waktu lama untuk segera menyingkirkan Nasution dari posisi strategisnya di tubuh Angkatan Darat. Tahun 1962, Nasution dicopot dari kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan digantikan oleh Achmad Yani. Nasution kemudian menempati posisi menteri pertahanan merangkap kepala staf angkatan bersenjata dengan para kepala staf dari keempat angkatan. Keempat kepala staf angkatan tersebut diangkat menjadi panglima angkatan masing-masing yang bertanggung jawab kepada presiden Soekarno bukan kepada Nasution. Pada saat itu posisi Nasution tidak lebih sebagai kepala administrasi departemen pertahanan dan staf angkatan bersenjata (Sundhaussen, 1986:281).

Penyingkiran Nasution dari posisi strategisnya di Angkatan Darat lebih banyak disebabkan oleh sikap politiknya yang teguh menentang paham komunisme. Pada saat itu Soekarno sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye ideologi Nasakom. Tidak dapat dibayangkan seorang perwira militer dengan pengaruh dan wewenang kuat yang anti komunis berada di belakangnya setiap saat, mendukung kebijakan politiknya tetapi memiliki keyakinan politik berbeda. Walaupun Achmad Yani juga seorang anti komunis, Ia lebih suka diajak berkompromi dan mudah dipengaruhi (Ricklefs, 1989:410). Dari perspektif Soekarno, pencopotan Nasution dapat diterima, tidak demikian halnya dengan Nasution yang beranggapan bahwa pencopotan dirinya menandakan pergeseran arah politik semakin ke kiri dan ini berarti sebuah kemajuan bagi PKI. Hubungan

antara Nasution dengan Soekarno lebih dipersulit lagi dengan munculnya isu dewan jenderal yang hendak menggulingkan Soekarno dari kedudukannya dengan bantuan Amerika Serikat. Isu yang disebarakan PKI itu dimaksudkan untuk menjatuhkan kepercayaan Soekarno terhadap beberapa perwira Angkatan Darat yang anti komunis.

G30S merupakan sebuah peristiwa yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan situasi politik di Indonesia menjelang berakhirnya demokrasi terpimpin. Pada peristiwa tersebut enam anggota dari Angkatan Darat yaitu Achmad Yani, S. Parman, M.T. Haryono, Suprpto, Panjaitan, dan Sutoyo menjadi korban. Sementara itu Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri. Angkatan Darat mendapat hikmah besar dari peristiwa itu karena mereka mempunyai alasan yang kuat untuk menghancurkan PKI bahkan kemudian melakukan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas bahwa peranan Nasution dalam masa peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto membawa dampak yang sangat besar bagi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Peristiwa G30S 1965 menjadi awal periodisasi dalam penelitian ini karena sejak terjadinya peristiwa itu, peta politik Indonesia mulai menunjukkan perubahan penting bagi posisi militer, serta arah yang semakin jelas bagi kemungkinan terjadinya peralihan kekuasaan, sedangkan tahun 1968 resminya pemerintahan Soeharto yang berasal dari kalangan militer memegang tampuk kekuasaan, setelah MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden yang

melambangkan sebuah peralihan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam tema penelitian. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus penelitian skripsi ini sehingga dijadikanlah ide dasar dari penulisan skripsi ini. Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Peranan A. H. Nasution Dalam Peralihan Kekuasaan dari Pemerintahan Soekarno ke Soeharto 1965-1968”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam skripsi ini. Adapun permasalahan pokok yang akan dikemukakan ialah:

“Bagaimana peran A.H. Nasution dalam peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto 1965-1968 ?”.

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka rumusan masalah di atas harus dibatasi dengan beberapa pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik militer di Indonesia tahun 1965-1968 ?
2. Bagaimana latar belakang karir militer Abdul Haris Nasution ?
3. Bagaimana langkah-langkah yang diambil A.H. Nasution dalam mendorong proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto 1965-1968?
4. Bagaimanakah Proses Lahirnya Pemerintahan Orde Baru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana peranan A. H. Nasution dalam peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto 1965-1968, serta dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan ke dalam rumusan masalah di atas, yang diantaranya:

1. Memperoleh gambaran mengenai peran politik militer di Indonesia tahun 1965-1968.
2. Memperoleh gambaran mengenai latar belakang karir militer Abdul Haris Nasution.
3. Memaparkan langkah-langkah yang diambil A.H. Nasution dalam mendorong proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto 1965-1968.
4. Memperoleh gambaran mengenai Proses Lahirnya Pemerintahan Orde Baru.

D. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1986:32), metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Di samping itu, metode sejarah juga merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik tentang

bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penulisan sejarah, yang mengandung empat langkah penting, diantaranya :

- a. *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, yang diantaranya : perpustakaan UPI, Perpustakaan TNI AD, Perpustakaan Konferensi Asia Afrika, perpustakaan daerah Jawa Barat. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli buku-buku di Gramedia, Palasari, Gunung Agung, dan mencari sumber-sumber melalui internet.
- b. *Kritik*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. *Interpretasi*, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, penulis mengerahkan seluruh kemampuan intelektual dalam membuat deskripsi, analisis kritis serta seleksi dari fakta-fakta

tentang Peranan A. H. Nasution dalam peralihan kekuasaan, sehingga akan menghasilkan bentuk penulisan sejarah yang utuh. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Misalnya, dalam kegiatan ini, penulis memberi penekanan penafsiran terhadap data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut tentang metode dan teknik penelitian akan dibahas di bab III dalam metodologi penelitian.

- d. *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata penulisan EYD yang baik dan benar.

2. Teknik Penelitian

Dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan pengkajian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Sumber yang dapat dikumpulkan penulis hanya sumber tertulis yang

merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu, penulis hanya akan melakukan teknik studi literatur ini karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa tulisan, pendapat dan teori-teori serta analisa dari berbagai literatur yang dijadikan landasan pemikiran yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam skripsi mengenai peranan A.H. Nasution dalam peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto 1965-1968.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya.

BAB IV Peranan A.H. Nasution dalam peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama. Adapun sistematika dalam bab ini, penulis bagi ke dalam beberapa sub judul diantaranya kondisi politik Indonesia menjelang peralihan kekuasaan tahun 1965-1968, latar belakang karir militer A.H Nasution, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai langkah-langkah yang diambil A.H. Nasution dalam mendorong proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dan pemaparan mengenai dampak peralihan kekuasaan yang dilakukan A.H. Nasution terhadap perkembangan politik di Indonesia tahun 1965-1968.

BAB VI KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini peneliti menuangkan kesimpulan dari hasil pembahasan yang berisi mengenai interpretasi peneliti terhadap kajian yang menjadi penelitian yang disertai dengan analisis peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan atas jawaban-jawaban dari rumusan masalah.